

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

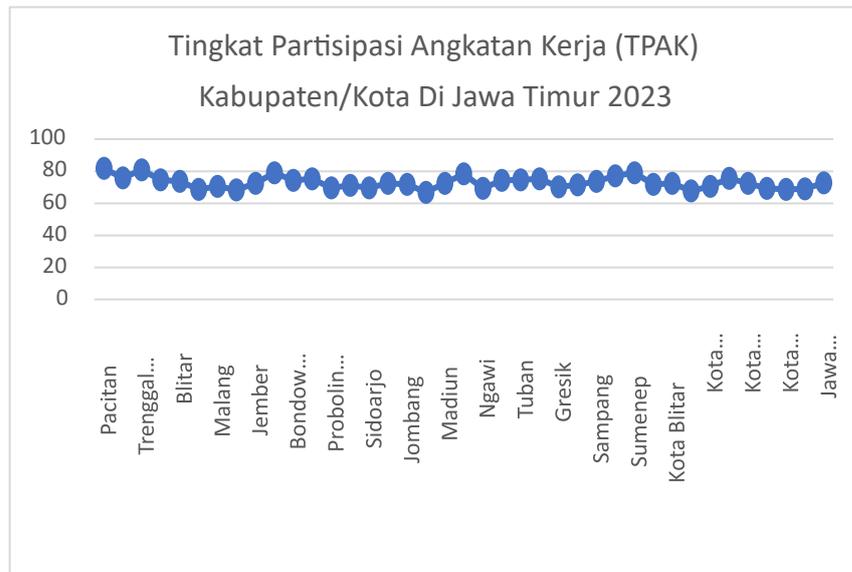
Sebuah pemerintahan dengan populasi besar serta begitu berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks dalam mengelola pasar kerja. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja, yang membawa konsekuensi luas di sektor sosial, ekonomi, dan politik. Di tengah dinamika global dan transformasi cepat dalam struktur perekonomian, identifikasi determinan yang menjadi pengaruh pada partisipasi angkatan kerja menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan (Wihastuti & Rahmatullah, 2018).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ialah satu dari banyaknya tolak ukur pada pemahaman dinamika pasar tenaga kerja di suatu wilayah. TPAK memperlihatkan jumlah proporsi penduduk usia kerja yang masih aktif terlibat pada kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja ataupun sebagai pencari kerja. Angka ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi secara umum, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana potensi tenaga kerja suatu wilayah dimanfaatkan dalam proses produksi ekonomi (Sari & Sugiharti, 2022). Di wilayah Madura, TPAK menjadi fenomena menarik untuk diteliti karena wilayah ini memiliki karakteristik budaya, ekonomi, dan sosial yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Berbagai tantangan struktural dan sosial yang khas menjadikan

Madura sebagai objek penelitian yang potensial untuk memahami pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap TPAK.

**Gambar 1. 1**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di wilayah Madura sangat layak untuk dijadikan objek penelitian karena adanya perbedaan keterlibatan individu usia produktif dalam dunia kerja. antar beberapa kabupaten dalam wilayah Madura, serta perbandingannya dengan wilayah lain di Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2023 diatas, Sumenep dan Pamekasan memiliki TPAK yang cukup tinggi, yaitu 78,86% dan 77,14% yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di wilayah tersebut terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, Bangkalan 71,49% dan Sampang 73,54% memiliki TPAK yang lebih rendah, dengan Bangkalan bahkan berada di bawah rata-rata TPAK Jawa Timur yang tercatat 72,56%. Perbedaan ini mencerminkan ketidakmerataan partisipasi angkatan kerja

di Madura, yang dapat terpengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi, seperti faktor tingkat pendidikan, kualitas infrastruktur, dan akses ke lapangan kerja.

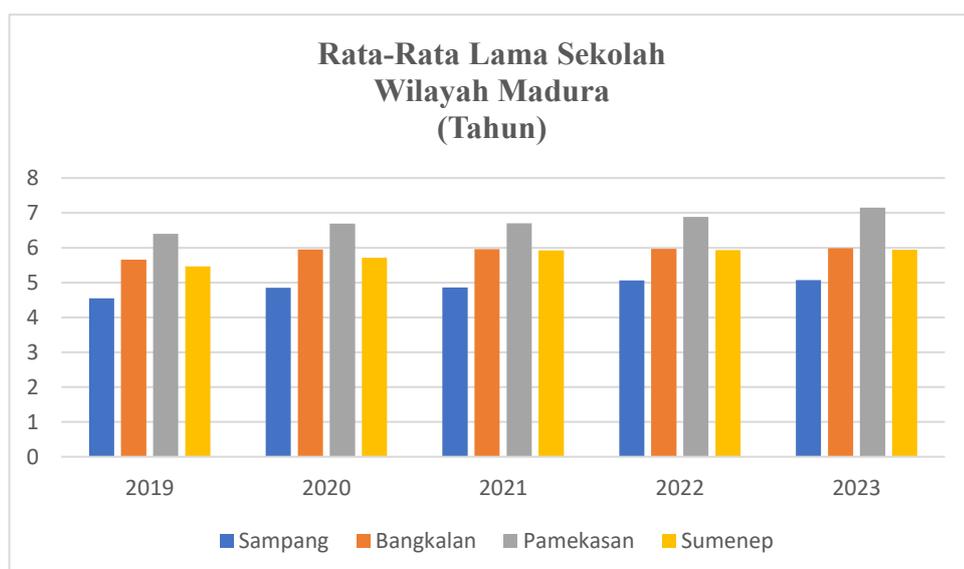
Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja yang perlu dipahami lebih dalam. Penelitian terhadap TPAK di Madura dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi di beberapa wilayah seperti Bangkalan dan Sampang, yang kemungkinan disebabkan oleh ketergantungan pada sektor primer, terbatasnya infrastruktur, serta rendahnya akses pendidikan dan pelatihan vokasional. Di sisi lain, wilayah dengan TPAK tinggi seperti Sumenep dan Pamekasan mungkin memiliki kebijakan atau praktik yang mendukung peningkatan partisipasi angkatan kerja yang bisa dijadikan model pada kabupaten lainnya.

Salah satu dari berbagai indikator yang menjadi pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja ialah pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas tenaga kerja. Menurut (Nazwa Naisniatunnisa Sholihah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024) sistem pendidikan di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni meliputi pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal mencakup tiga tingkatan utama, yaitu dasar (setingkat SD), menengah (setingkat SMP dan SMA), serta pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Sementara itu, pendidikan informal merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan keluarga atau komunitas tertentu, yang dilakukan dengan bertanggung jawab serta secara sadar untuk mendukung perkembangan individu.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memberikan dampak pada keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam terjun di pasar kerja formal, yang menawarkan stabilitas dan pendapatan yang lebih baik. Namun, di Madura, tantangan terkait akses dan kualitas pendidikan masih menjadi kendala serius. Banyak wilayah di Madura yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan, seperti minimnya sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang berkualitas. Akibatnya, sebagian besar penduduk usia kerja di Madura hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang sering kali membatasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Rendahnya pendidikan ini tidak hanya memengaruhi kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja, tetapi juga menurunkan daya tarik wilayah Madura sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis tenaga kerja berketerampilan tinggi.

**Gambar 1. 2**

**Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Madura Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Dari data diatas menunjukkan rata-rata lama sekolah (dalam tahun) untuk empat kabupaten diatas yang meliputi kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep, menunjukkan peningkatan selama periode 2019-2023. Kabupaten Sampang mencerminkan rata-rata lama sekolah terendah, yakni 4,55 tahun pada 2019 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5,07 tahun pada 2023. Bangkalan juga menunjukkan peningkatan stabil dari 5,66 tahun pada 2019 menjadi 5,99 tahun pada 2023, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif lambat. Pamekasan menonjol sebagai kabupaten yang mempunyai nilai rata-rata lama sekolah paling tinggi, yakni 6,4 tahun pada 2019 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 7,15 tahun pada 2023. Sementara itu, Sumenep mengalami peningkatan moderat dari 5,46 tahun pada 2019 menjadi 5,94 tahun pada 2023. Secara keseluruhan, keempat kabupaten wilayah Madura menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah yang mencerminkan adanya peningkatan akses atau kesadaran terhadap pendidikan di wilayah tersebut, meskipun terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan di masing-masing kabupaten.

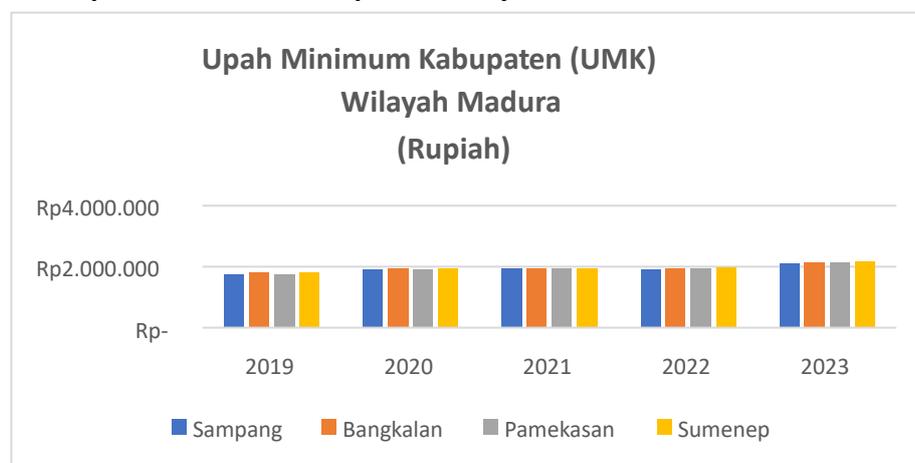
Menurut (Ariesti & Asmara, 2023) penurunan angka tingkat partisipasi angkatan kerja dapat terpengaruhi faktor seperti pertumbuhan populasi usia produktif yang belum sebanding dengan jumlah peluang kerja yang masih tersedia secara memadai. Hal tersebut dapat menimbulkan peningkatan angka pengangguran dan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan produktivitas yang optimal, terutama karena sumber daya manusia belum sepenuhnya memiliki keterampilan yang memadai. Selain itu, adanya penduduk yang masih menempuh

pendidikan atau fokus pada tugas rumah tangga juga dapat berkontribusi terhadap penurunan TPAK.

Selain pendidikan, upah minimum juga berpengaruh signifikan atas TPAK. Upah minimum merupakan instrumen peraturan yang dirancang sebagai perlindungan bagi tenaga kerja, sekaligus menciptakan insentif bagi masyarakat usia kerja untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja formal. Namun, di Madura, tingkat upah minimum regional sering kali dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak. Tingkat upah yang rendah ini dapat menyebabkan munculnya rasa ketidakpuasan di kalangan tenaga kerja, sehingga banyak individu memutuskan untuk terlibat dalam pekerjaan di sektor informal yang memberi fleksibilitas lebih besar meskipun dengan pendapatan yang tidak stabil. Lebih jauh lagi, rendahnya upah minimum di Madura tidak hanya berdampak pada motivasi individu untuk bekerja, tetapi juga memengaruhi persepsi tentang nilai kerja itu sendiri sehingga dapat memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan.

**Gambar 1. 3**

**Upah Minimum Kabupaten Wilayah Madura Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Malang , 2023

Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk pada wilayah Madura yang meliputi kabupaten Sampang, Bangkalan, Pamekasan, serta Sumenep selama periode 2019-2023 menunjukkan kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2019, UMK di Sampang dan Pamekasan tercatat sebesar Rp1.763.268, sedangkan Bangkalan dan Sumenep memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi, yakni Rp1.801.406. Kenaikan terjadi setiap tahun di semua kabupaten, dengan peningkatan yang relatif stabil. Pada 2023, UMK di Sampang mencapai Rp2.114.335, sementara Bangkalan naik menjadi Rp2.152.451. Pamekasan menunjukkan angka UMK sebesar Rp2.133.655, sedangkan Sumenep mencatatkan nilai tertinggi di antara keempat kabupaten, yakni Rp2.176.820. Data diatas mencerminkan adanya upaya penyesuaian UMK sesuai dengan kebutuhan hidup dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah, dengan Sumenep secara konsisten memiliki UMK tertinggi, sementara Sampang cenderung memiliki nilai UMK yang paling rendah.

Pada penelitian (Nazwa Naisniatunnisa Sholihah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024) menyebutkan dalam Teori Permintaan Tenaga Kerja sebagaimana dijelaskan oleh (mankiw, 2006) yang membahas keterkaitan antara besaran upah dan permintaan terhadap tenaga kerja. Teori menguraikan bahwa ketika upah mengalami peningkatan, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun, sedangkan ketika upah menurun, kebutuhan akan tenaga kerja justru dapat meningkat. Elemen yang turut memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja ialah upah minimum. Apabila terjadinya peningkatan yang progresif pada upah minimum yang ditetapkan pada suatu daerah, sehingga kecenderungan partisipasi tenaga kerja bisa menurun. Berdasarkan hal tersebut, fokus utama dalam

penelitian ini guna menganalisis berbagai determinan yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Wilayah Madura.

Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi salah satu dari banyak faktor penting yang memengaruhi TPAK di Madura. Tingginya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan ketidakseimbangan terhadap kuantitas tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dengan prospek kerja yang dapat diserap oleh pasar. Di Madura, tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, terutama di kalangan usia muda. Hal ini terjadi karena lapangan kerja yang tersedia di Madura masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, yang sering kali tidak dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya investasi di sektor-sektor yang dapat mewujudkan lapangan kerja baru, contohnya manufaktur dan jasa. Akibatnya, banyak penduduk usia kerja yang kehilangan motivasi untuk mencari pekerjaan karena merasa peluang kerja yang tersedia belum memadai atau belum sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

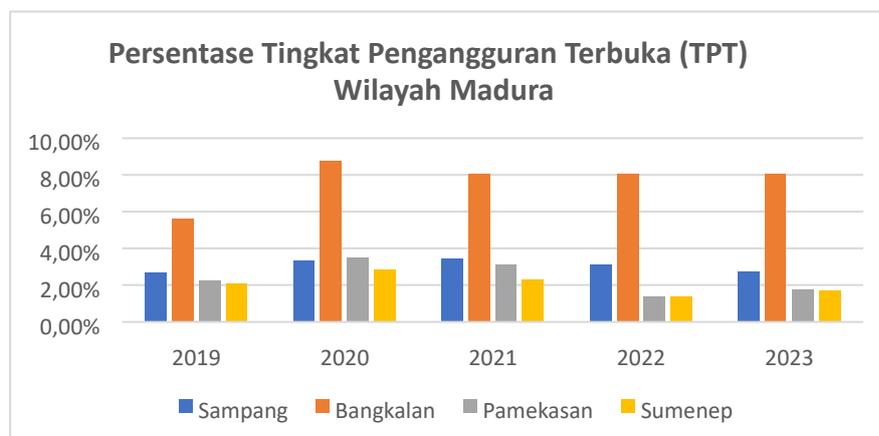
Menurut (Nazwa Naisniatunnisa Sholihah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024) pengangguran merupakan permasalahan umum yang terjadi di berbagai wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah kelompok usia muda. Berdasarkan ketentuan pemerintah Indonesia, seseorang dikategorikan dalam usia kerja apabila berumur antara 15 hingga 65 tahun. Individu yang tidak melanjutkan pendidikan atau tidak memiliki pekerjaan akan berpotensi menurunkan tingkat keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan upah buruh

dapat memberikan tekanan bagi perusahaan, yang kemudian mungkin memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, menghentikan hubungan kerja, atau menunda perekrutan karyawan baru.

Di Wilayah Madura terdapat fenomena yang semakin kompleks jika dikaitkan dengan karakteristik sosial dan budaya Madura. Masyarakat wilayah Madura banyak dikenal karena berbekal budaya kerja yang cenderung berorientasi pada sektor informal, yang dipandang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, dominasi sektor informal juga menciptakan tantangan dalam upaya meningkatkan TPAK, karena sektor ini sering kali tidak tercatat dalam statistik resmi dan tidak memberikan perlindungan tenaga kerja yang memadai. Selain itu, pola kehidupan yang berbasis tradisi dan keagamaan juga memengaruhi preferensi masyarakat Madura dalam memilih jenis pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada pola partisipasi angkatan kerja di wilayah ini.

**Gambar 1. 4**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Madura Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Jawa Timur, 2023

Data pengangguran tahun 2019-2023 menunjukkan variasi tingkat pengangguran di empat kabupaten wilayah di Madura yang mencakup Sampang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Kabupaten Bangkalan menduduki tingkat pengangguran tertinggi, naik dari 5,62% pada 2019 menjadi 8,77% pada 2020 dan stabil di angka 8,05% pada 2022-2023. Sebaliknya, Sumenep memiliki tingkat pengangguran terendah, turun dari 2,08% pada 2019 menjadi 1,36% pada 2022, meskipun sedikit meningkat menjadi 1,71% pada 2023. Pamekasan juga menunjukkan tren positif, dengan penurunan signifikan dari 3,49% pada 2020 menjadi 1,74% pada 2023. Sampang mencatat pengangguran yang relatif stabil, dengan peningkatan kecil hingga 2021 sebelum menurun kembali menjadi 2,72% pada 2023. Data di atas mencerminkan tantangan signifikan di Bangkalan, sementara Sumenep, Pamekasan, dan Sampang menunjukkan perbaikan dalam mengatasi pengangguran.

Fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, berperan dalam menentukan kesiapan individu untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Sementara itu, kebijakan upah minimum turut memengaruhi keputusan individu untuk bekerja atau tidak, khususnya dalam sektor informal dan formal yang berkembang di daerah ini. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang dapat memicu ketidakpastian dan menurunkan insentif angkatan kerja untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

Hasil dalam penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi baik bagi pengambilan kebijakan di tingkat regional maupun nasional, melalui metode analitis dan empiris. Hasil penelitian ini diharapkan turut memberikan wawasan

strategis dalam perumusan strategi ketenagakerjaan yang kontekstual serta berbasis data. Dengan memahami secara menyeluruh dinamika tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang tidak hanya relevan secara teoritis, namun kebijakan yang tepat, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penyesuaian upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup, serta pengembangan lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Madura dapat meningkat sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Madura.

Dalam konteks perekonomian, TPAK berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, baik melalui pekerjaan formal maupun informal. Semakin tinggi TPAK, semakin besar pula potensi produktivitas dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Di wilayah Madura, yang secara historis menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta tingginya angka migrasi kerja, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi TPAK menjadi krusial. Oleh karena itu, peningkatan TPAK di Madura tidak hanya mencerminkan optimalisasi potensi tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi katalisator dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing.

Dengan demikian, dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggali pemahaman kondisi TPAK di Wilayah Madura, tetapi juga ingin memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi tenaga kerja yang optimal. Melalui analisis ini, diharapkan ada solusi yang

dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong Wilayah Madura menuju perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara potensi tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan riil pasar kerja di tingkat lokal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagai tindak lanjut dari latar belakang diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Wilayah Madura ?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Wilayah Madura ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Wilayah Madura ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan maksud tujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Wilayah Madura.
2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Wilayah Madura.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Wilayah Madura.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, yaitu:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini akan memperkaya wawasan dan pemahaman peneliti tentang dinamika pasar tenaga kerja, khususnya terkait dengan determinasi sosial yang mempengaruhi pasar tenaga kerja seperti Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel sosial dan ekonomi, serta mengaplikasikan teori-teori ekonomi dan sosial dalam konteks nyata di Wilayah Madura. Dengan penelitian ini, peneliti juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis kritis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data empiris.

### **2. Bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah**

Penelitian ini dapat digunakan menjadi rujukan oleh instansi pemerintah daerah di Madura, seperti dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, dan badan perencanaan daerah, untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. Dengan data mengenai pengaruh pendidikan, upah minimum, dan pengangguran terhadap partisipasi angkatan kerja, instansi terkait dapat merancang program peningkatan mutu sumber daya manusia, penyesuaian upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah, serta strategi penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang lebih tepat sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Madura.

### **3. Bagi Peneliti Lanjutan**

Pada penelitian ini dimaksudkan dapat berkontribusi sebagai landasan bagi peneliti lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor lain yang memengaruhi partisipasi angkatan kerja di Madura, seperti budaya lokal, infrastruktur, atau sektor-sektor ekonomi unggulan. Peneliti lanjutan juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pembandingan untuk menganalisis daerah lain dengan karakteristik serupa, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika pasar kerja di Indonesia.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dimana pada penelitian ini menerapkan metode regresi linear berganda, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2014 hingga 2023. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup Tingkat Pendidikan (diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah), Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan variabel dependen yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).